

## **Analisis Ketidaksetaraan Ekonomi Antar Daerah di Indonesia dalam Sudut Pandang Makro Ekonomi Islam Untuk Mewujudkan Keadilan dan Pemerataan Pembangunan Nasional yang Adil**

**Nur Faizahtus Shofiyyah,<sup>1</sup> Muhammad Yazid,<sup>2</sup>**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,<sup>1</sup>**  
**[nnurfaizatus@gmail.com](mailto:nnurfaizatus@gmail.com),<sup>1</sup>[muhammadyazid002@gmail.com](mailto:muhammadyazid002@gmail.com),<sup>2</sup>**

### **Abstrak**

Ketidaksetaraan ekonomi antar daerah di Indonesia adalah masalah struktural yang sudah lama ada dan hingga saat ini tetap menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Fokus pada aktivitas ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa memiliki dampak besar terhadap ketidaksetaraan pendapatan, infrastruktur, pendidikan, dan juga kualitas hidup masyarakat di luar Jawa. Ketidaksetaraan ini tercermin dalam data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan kesenjangan cukup lebar antara daerah barat dan timur Indonesia. Daerah Indonesia Timur seperti Maluku, Nusa Tenggara dan Papua masih tertinggal jauh dibandingkan daerah Jawa dan Sumatera dalam hal kontribusi ekonomi nasional.

Dalam sudut pandang makro ekonomi Islam, ketidaksetaraan ekonomi yang terus terjadi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah yang mengedepankan keadilan (adl), keseimbangan (mizan), dan pemerataan distribusi kekayaan. Islam menuntut adanya peran aktif negara dalam mengatur perekonomian agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, sebagaimana telah ditegaskan dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7. Ketidaksetaraan yang terjadi selama ini tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang lebih terpusat di Jawa, lemahnya distribusi sumber daya, serta minimnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan investasi di daerah-daerah tertinggal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) yang mengkaji berbagai sumber data sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku-buku, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan juga kajian-kajian terdahulu yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam penyebab terjadinya ketidaksetaraan ekonomi antar daerah di Indonesia dan mencari solusi alternatif berdasarkan prinsip-prinsip makro ekonomi Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi ini dapat diminimalkan dengan mengoptimalkan peran instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf produktif, dan juga infaq yang dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Selain itu, diperlukan peran nyata pemerintah sebagai otoritas pengatur diharuskan untuk mendistribusikan anggaran dan pembangunan secara adil di seluruh daerah Indonesia, khususnya di daerah yang tertinggal. Dengan penerapan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan dapat terwujud, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di seluruh daerah Indonesia. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya mengintegrasikan kebijakan moneter negara dengan

instrumen ekonomi Islam sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mendorong pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial.

**Keywords :** *Ketidaksetaraan Ekonomi, Daerah, Makro Ekonomi Islam, Keadilan, Zakat, Wakaf, Tawazun (pemerataan)*

### Abstract

Economic inequality between regions in Indonesia is a long-standing structural problem that remains a major challenge for national development. The focus on centralized economic activity in Java has a major impact on income inequality, infrastructure, education, and also the quality of life of communities outside Java. These inequalities are reflected in Gross Regional Domestic Product (GRDP) data that shows a wide gap between western and eastern Indonesia. Eastern Indonesian regions such as Maluku, Nusa Tenggara and Papua are still far behind Java and Sumatra in terms of national economic contribution.

From an Islamic macroeconomic point of view, the persistent economic inequality contradicts the basic principles of shari'ah that prioritize justice (adl), balance (mizan), and equitable distribution of wealth. Islam demands an active role of the state in regulating the economy so that wealth does not only circulate among the rich, as has been confirmed in Q.S Al-Hasyr verse 7. The inequality that has occurred so far is inseparable from development policies that are more centralized in Java, weak distribution of resources, and lack of equitable distribution of infrastructure development and investment in underdeveloped regions.

This research uses a qualitative method with a library research approach that examines various secondary data sources, such as scientific journals, books, data from the Central Statistics Agency (BPS), and also relevant previous studies. This study aims to further analyze the causes of economic inequality between regions in Indonesia and find alternative solutions based on Islamic macroeconomic principles.

The analysis shows that economic inequality can be minimized by optimizing the role of Islamic economic instruments such as zakat, productive waqf, and infaq which are managed professionally and on target. In addition, the real role of the government as the regulatory authority is required to distribute the budget and development fairly throughout Indonesia, especially in disadvantaged areas. With the application of the principle of distributive justice in Islamic economics, equitable and just national development can be realized, so as to encourage an increase in overall community welfare in all regions of Indonesia. This research also recommends the need to integrate state monetary policy with Islamic economic instruments as an effective solution to overcome inequality and encourage development oriented towards social justice.

**Keywords:** Economic Inequality, Regional, Islamic Macroeconomics, Justice, Zakat, Waqf, Equity.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia, yang telah beroperasi dalam beberapa dekade terakhir, terkait erat dengan tantangan klasik dalam bentuk ketidaksetaraan yang semakin jelas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05% masih di dominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi lebih dari 58% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sementara itu, daerah Indonesia Timur seperti Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua hanya berkontribusi sekitar 4-6% dari total PDB nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia masih bersifat Java-Centric atau terpusat di Pulau Jawa. Pemerataan pembangunan antar daerah belum sepenuhnya tercapai, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan, infrastruktur, dan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah. Ketidaksetaraan ini juga berdampak pada meningkatnya arus urbanisasi, di mana masyarakat dari daerah tertinggal melakukan migrasi besar-besaran ke kota-kota besar, terutama di Jawa, demi mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Hal ini justru semakin memperlebar kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal.

Dari sudut pandang makro ekonomi islam, fenomena ketidaksetaraan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi syari'ah, yang menekankan pentingnya keadilan (adl), keseimbangan (mizan), dan pemerataan (tawazun). Islam mengajarkan bahwa distribusi kekayaan tidak hanya berputar dikalangan orang-orang kaya dan suatu kelompok tertentu saja. Sebagaiman firman Allah dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7, "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu, Maqashidah Syari'ah sebagai landasan utama dalam sistem ekonomi Islam juga menuntut adanya perlindungan dan pemenuhan terhadap lima hal pokok, yaitu:

1. Agama (dien)
2. Jiwa (nafs)
3. Akal (aql)
4. Keturunan (nasl)
5. Harta (maal)

Ketidaksetaraan ekonomi yang tajam berpotensi besar mengancam keberlangsungan Maqashidah Syari'ah tersebut. Ketika akses ke sumber daya ekonomi tidak merata, maka dampaknya tidak hanya dapat menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan, tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik dalam jangka panjang.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi seperti otonomi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Desa sebenarnya telah dijalankan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, mulai dari pengawasan yang lemah hingga praktik korupsi dan keterampilan daerah dalam mengelola anggaran secara efektif. Akibatnya, ketidaksetaraan antar daerah tetap menjadi masalah yang berkelanjutan dar waktu ke waktu.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif berdasarkan nilai-nilai syari'ah untuk mendorong pemerataan ekonomi antar daerah. Instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf produktif, infaq, dan sedekah jika dikelola secara optimal dan diintegritaskan ke dalam program

pembangunan nasional, itu bisa menjadi motor penggerak dalam menekankan ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, peran negara sebagai regulator utama sistem ekonomi Islam juga sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan sebenarnya didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam ketidaksetaraan ekonomi antar daerah di Indonesia dalam sudut pandang makro ekonomi Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu, diharapkan bahwa Indonesia mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat di berbagai daerah tanpa terkecualikan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur (library research). Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena ketidaksetaraan ekonomi antar daerah di Indonesia secara mendalam, dengan fokus pada analisis dari sudut pandang makro ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan para peneliti untuk memahami dan menganalisis berbagai berbagai data naratif, teori, dan konsep-konsep ekonomi Islam yang terkait dengan masalah yang diangkat.

### **1. Jenis dan sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya:

- Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan tema ketidaksetaraan ekonomi dan makro ekonomi Islam.
- Buku-buku referensi ekonomi Islam dan makro ekonomi yang membahas konsep keadilan, distribusi kekayaan, dan pemerataan pembangunan.
- Laporan resmi dari lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas, khususnya terkait data PDRB per wilayah, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), serta program-program pembangunan daerah.
- Dokumen kebijakan terkait otonomi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, dan juga program-program pemerataan ekonomi lainnya.
- Literatur keislaman seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab klasik dan kontemporer yang membahas prinsip keadilan ekonomi dalam Islam dan penerapannya dalam konteks negara.

### **2. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi yang relevan baik secara offline maupun online, antara lain melalui:

- Perpustakaan kampus dan perpustakaan umum untuk mendapatkan buku-buku teks ekonomi Islam dan makro ekonomi.
- Portal jurnal nasional dan internasional seperti Google Scholar, ResearchGate, dan Sinta untuk mendapatkan jurnal-jurnal terbaru.

- Website resmi pemerintah seperti bps.go.id, kemenkeu.go.id, dan bappenas.go.id untuk mendapatkan data statistik dan kebijakan terbaru.
- Kitab-kitab tafsir dan fiqh ekonomi Islam untuk mendalami landasan syariah terkait distribusi kekayaan dan pemerataan pembangunan.

Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan keakuratan sumber, guna memastikan bahwa hanya data yang valid dan mendukung analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

### 3. Teknik analisis data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode content analysis atau analisis isi. Peneliti mengkaji secara sistematis isi dari berbagai literatur yang diperoleh, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama dalam penelitian ini, seperti:

- Kondisi ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia.
- Faktor penyebab ketidaksetaraan ekonomi.
- Pandangan makro ekonomi Islam terhadap ketidaksetaraan ekonomi.
- Solusi dan strategi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan setiap temuan secara terperinci, sehingga mampu memberikan gambaran utuh mengenai fenomena ketidaksetaraan ekonomi antar daerah di Indonesia dari sudut pandang ekonomi Islam.

### 4. Validitas data

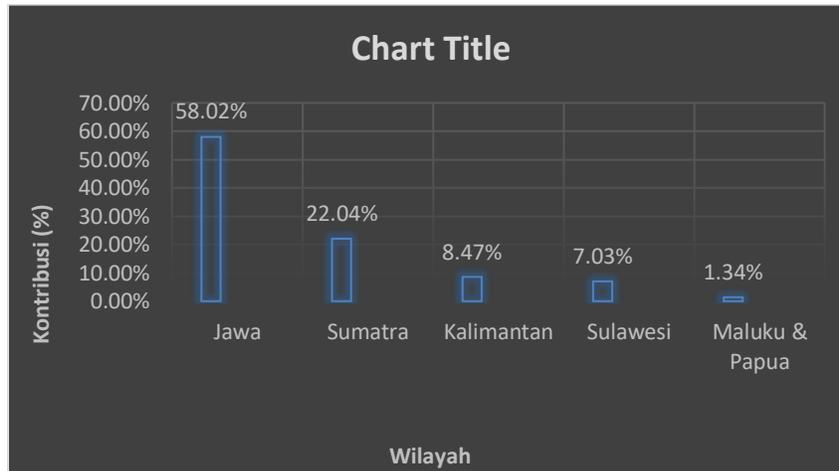
Untuk menjaga validitas dan keakuratan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Data statistik dari BPS dan lembaga resmi pemerintah dibandingkan dengan data atau temuan dari jurnal ilmiah, serta dianalisis bersama dengan teori dan konsep dalam ekonomi Islam.

Selain itu, peneliti juga mengacu pada fatwa dan pendapat ulama serta kajian akademik dalam bidang ekonomi Islam guna memperkuat landasan syari'ah dalam analisis yang dilakukan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara syar'i.

## PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Ketidaksetaraan Ekonomi Antar Daerah di Indonesia

Ketidaksetaraan ekonomi antar daerah di Indonesia merupakan persoalan struktural yang telah terjadi sejak masa kolonial dan terus berlanjut hingga saat ini. Berdasarkan data BPS tahun 2023, Pulau Jawa masih menjadi pusat utama aktivitas ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 58,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sebaliknya, daerah Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua hanya memberikan kontribusi sekitar 4,58%. Ketidaksetaraan ini diperparah oleh fakta bahwa Jawa hanya dihuni oleh sekitar 56% penduduk Indonesia, tetapi menguasai lebih dari setengah aktivitas ekonomi nasional.



Kesenjangan ini bukan hanya soal angka statistik, tetapi berimplikasi pada berbagai sektor kehidupan masyarakat di luar Jawa. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang kerja jauh lebih terbatas di daerah-daerah seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ketidaksetaraan inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong urbanisasi besar-besaran dari daerah ke kota-kota besar di Jawa, sehingga semakin memperlebar jurang ketidaksetaraan antar daerah.

## 2. Faktor Penyebab Ketidaksetaraan Ekonomi Antar Daerah

Ketidaksetaraan ekonomi antar daerah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya:

- **Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Terfokus di Jawa**  
Kebijakan pembangunan yang selama ini lebih memprioritaskan Pulau Jawa sebagai pusat industri, perdagangan, dan pemerintahan menyebabkan daerah-daerah di luar Jawa terpinggirkan dari arus utama pembangunan nasional. Infrastruktur yang lebih maju di Jawa menarik investor untuk terus menanamkan modal di wilayah ini, sementara daerah lain kian tertinggal.
- **Ketidaksetaraan Infrastruktur**  
Pembangunan infrastruktur yang tidak merata juga menjadi penyebab utama ketidaksetaraan. Akses jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas umum lainnya jauh lebih baik di Jawa dibandingkan di luar Jawa. Hal ini berdampak langsung pada biaya logistik dan distribusi barang yang lebih mahal di daerah, sehingga memicu harga-harga kebutuhan pokok lebih tinggi dan memperburuk kemiskinan.
- **Rendahnya Kualitas SDM dan Minimnya Investasi**  
Daerah-daerah tertinggal di Indonesia Timur umumnya masih mengalami rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) akibat keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini membuat daerah-daerah tersebut kurang menarik bagi investor, sehingga pembangunan ekonomi berjalan lambat.
- **Pola Distribusi Anggaran dan Kebijakan Pusat**  
Kebijakan otonomi daerah yang diharapkan mampu memperkecil ketidaksetaraan justru belum sepenuhnya efektif. Banyak daerah masih bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kapasitas daerah dalam mengelola anggaran dan menarik investasi masih rendah. Dana otonomi khusus dan Dana Desa sering kali tidak digunakan secara maksimal untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

### 3. Analisis Ketidaksetaraan Ekonomi dalam Perspektif Makro Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, ketidaksetaraan ekonomi yang dibiarkan terjadi secara terus-menerus adalah bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan Maqashid Syari'ah. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut adanya pemerataan distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi agar tidak ada satu kelompok atau daerah yang hidup dalam kemewahan sementara yang lain terjebak dalam kemiskinan.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, Islam menegaskan larangan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Jika dikontekstualisasikan dalam skala negara, hal ini berarti negara wajib memastikan bahwa pembangunan dan kekayaan nasional tersebar secara merata ke seluruh daerah, bukan hanya menumpuk di satu daerah.

Ekonomi Islam juga mengajarkan pentingnya peran negara sebagai regulator yang adil. Negara berkewajiban mengelola sumber daya alam secara kolektif untuk kemaslahatan umat. Kekayaan alam di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi seharusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat setempat, bukan hanya untuk keuntungan investor dan pemerintah pusat.

### 4. Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam sebagai Solusi Pengurangan Ketidaksetaraan

Islam menawarkan solusi konkret untuk mengurangi ketidaksetaraan melalui instrumen-instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, wakaf produktif, infaq, dan sedekah:

- Zakat Produktif

Zakat bukan hanya sekadar kewajiban individual, tetapi juga instrumen distribusi kekayaan yang sangat efektif. Zakat produktif yang dikelola secara profesional dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat miskin di daerah tertinggal, misalnya melalui program pelatihan usaha, pemberian modal kerja, atau pembukaan sentra ekonomi baru di daerah.

- Wakaf Produktif untuk Pembangunan Ekonomi Daerah

Wakaf produktif juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Contohnya, lahan-lahan wakaf bisa dimanfaatkan untuk mendirikan pusat pendidikan, rumah sakit, hingga pusat ekonomi seperti pasar rakyat yang dikelola bersama. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf produktif mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

- Infaq dan Sedekah Terstruktur

Infaq dan sedekah yang dikumpulkan secara terstruktur dan dikelola lembaga resmi juga dapat menjadi stimulus bagi pembangunan ekonomi daerah. Program-program seperti bantuan modal UMKM, penguatan ekonomi desa, hingga pembangunan fasilitas umum di daerah bisa dibiayai dari dana sosial umat ini.

### 5. Peran Strategis Negara dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan kebijakan pemerataan, antara lain:

- Memperkuat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal agar biaya logistik menurun dan daya saing daerah meningkat.
- Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan yang merata.
- Mendorong investasi yang berpihak pada daerah-daerah kurang berkembang dengan insentif pajak atau kemudahan perizinan.
- Memastikan bahwa pengelolaan kekayaan alam di daerah dikembalikan untuk kemakmuran rakyat daerah, bukan hanya menguntungkan pusat dan korporasi besar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi antar daerah di Indonesia merupakan persoalan serius yang terjadi secara struktural dan sistematis. Ketidaksetaraan ini ditunjukkan dengan dominasi Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, sementara daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua masih tertinggal dalam berbagai aspek, mulai dari kontribusi terhadap PDB nasional, kualitas sumber daya manusia, hingga infrastruktur dasar.

Faktor utama penyebab ketidaksetaraan ini antara lain adalah sentralisasi pembangunan di Jawa, ketidaksetaraan infrastruktur antar daerah, rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal, serta pola distribusi anggaran dan kebijakan pemerintah pusat yang belum sepenuhnya berpihak pada pemerataan pembangunan nasional. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakstabilan sosial, meningkatnya urbanisasi, serta memperlebar jurang kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.

Dalam sudut pandang makro ekonomi Islam, ketidaksetaraan ekonomi yang terjadi jelas bertentangan dengan prinsip keadilan (adl), keseimbangan (mizan), dan distribusi kekayaan yang merata. Islam secara tegas melarang terjadinya penumpukan harta pada segelintir orang atau kelompok tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syari'ah.

Ekonomi Islam menawarkan solusi melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial seperti zakat, wakaf produktif, infaq, dan sedekah yang dikelola secara profesional dan terstruktur. Selain itu, negara juga harus memainkan peran sentral sebagai regulator dan pengendali kebijakan untuk memastikan bahwa pembangunan nasional benar-benar berdampak pada pengurangan ketidaksetaraan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah tertinggal.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada juga beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1). Pemerintah harus memperkuat komitmen dalam pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah tertinggal seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, biaya logistik dan distribusi dapat ditekan sehingga harga barang dan jasa di daerah tersebut menjadi lebih terjangkau dan kompetitif.
- (2). Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tertinggal harus menjadi prioritas utama melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang merata. Program beasiswa, pelatihan keterampilan, serta pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah harus diperbanyak agar masyarakat di daerah tertinggal memiliki daya saing yang lebih baik.
- (3). Pengelolaan sumber daya alam di daerah harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Pemerintah harus memastikan bahwa hasil kekayaan alam dari daerah, khususnya di luar Jawa, benar-benar dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat setempat dan bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak atau terpusat di pemerintah pusat.
- (4). Optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf produktif, infaq, dan sedekah harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah bekerja

- sama dengan BAZNAS dan lembaga-lembaga zakat/wakaf lainnya perlu menyusun program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terukur dan berkelanjutan.
- (5). Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih berpihak pada pemerataan ekonomi dengan memberikan insentif kepada investor yang berani berinvestasi di daerah tertinggal serta menciptakan kawasan-kawasan ekonomi khusus (KEK) di luar Jawa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
  - (6). Pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana transfer daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa harus diperketat agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan ketidaksetaraan ekonomi antar daerah di Indonesia dapat berangsur-angsur menurun dan tercipta keadilan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip makro ekonomi Islam. Negara sebagai pengelola amanah rakyat harus mampu mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjamin pemerataan dan keberlanjutan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). Gini Ratio Maret 2023 Tercatat Sebesar 0,388. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-388-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2023. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>
- MileniaNews. (2023). Ekonomi Makro dalam Pandangan Islam. Diakses dari <https://milenianews.com/mata-akademisi/ekonomi-makro-dalam-pandangan-islam/>
- Nahdlatul Ulama. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat, Infak, dan Sedekah. Diakses dari <https://nu.or.id/nasional/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-melalui-zakat-infak-dan-sedekah-6JJ3i>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf: Pemberdayaan Ekonomi Produktif. Diakses dari [https://fesjarjawa.com/asset/upload/1-WARYONO-bahan\\_kajian\\_surabaya\\_fesyar\\_Bank\\_Indonesia\\_15\\_09\\_2024.pdf](https://fesjarjawa.com/asset/upload/1-WARYONO-bahan_kajian_surabaya_fesyar_Bank_Indonesia_15_09_2024.pdf)
- Katadata. (2023). Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Meningkat pada Maret 2023. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/69fb350713786ab/ketimpangan-ekonomi-di-indonesia-meningkat-pada-maret-2023>
- Indonesian Research Journal. (2023). Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan. Diakses dari <https://www.irje.org/irje/article/view/1869>
- Wakaf Mulia. (2023). Kolaborasi Wakaf Produktif dan Zakat: Model Sinergi Kesejahteraan. Diakses dari <https://www.wakafmulia.org/kolaborasi-wakaf-produktif-dan-zakat-model-sinergi-kesejahteraan/>

- IAIN Kudus. (2014). Distribusi dalam Ekonomi Islam. Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/198/1196>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2023. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/03/01/49016c4556ea47b96d62e9bf/indonesia-inter-regional-trade-2023.html>
- World Bank. (2021). Indonesia Economic Prospects: Boosting Regional Growth and Equity. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospect>
- Antonio, M. S. (2020). Islamic Economic System and Regional Disparities: A Case of Indonesia. <https://journal.uii.ac.id/JIES/article/view/12345>
- Setiawan, B., & Dewi, R. (2021). Public Spending and Regional Economic Growth: The Islamic Perspective. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEAS-03-2021-0032/full/html>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). Strategi Pemerataan Ekonomi Berbasis Syariah. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/strategi-pemerataan-ekonomi-berbasis-syariah/>
- Chapra, M. U. (2016). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. <https://irti.org/product/the-islamic-vision-of-development-in-the-light-of-maqasid-al-shariah/>